



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sangatta, 13 Januari 2025

Pengguna Anggaran



Syahfur, S.Sos., M.Si

NIP. 19730708 200112 1 003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DAFTAR ISI..... 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

NERACA..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

LAPORAN OPERASIONAL ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB I PENDAHULUAN..... 5

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN5

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....6

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN8

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD..... 10

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD 10

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN 14

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 15

3.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 15

3.1.1 *Pendapatan-LRA*..... 15

3.1.2 *Belanja* 21

3.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 25

3.2.1 *Aset Lancar* 25

3.2.2 *Aset Tetap*..... 32

3.2.3 *Properti Investasi* **Error! Bookmark not defined.**

3.2.4 *Aset Lainnya* 35

3.2.5 *Kewajiban*..... 36

3.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 37

3.3.1 *Pendapatan-LO* 37

3.3.2 *Beban-LO* 38

3.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 42

BAB V PENUTUP 57

5.1 KESIMPULAN 57

5.2 SARAN..... 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan) SKPD	10
Tabel 2.2 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Belanja) SKPD	11
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	15
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024..	21
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pegawai Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	22
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	23
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	24
Tabel 3.6 Aset Lancar Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024.....	26
Tabel 3.7 Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	26
Tabel 3.8 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	30
Tabel 3.9 Rekapitulasi Persediaan Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	31
Tabel 3.10 Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024.....	33
Tabel 3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	35
Tabel 3.12 Properti Investasi Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.13 Aset Lainnya Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024.....	36
Tabel 3.14 Nilai Kewajiban Jangka Pendek Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	36
Tabel 3.15 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	37
Tabel 3.16 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.17 Pendapatan-LO Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.18 Beban-LO Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025	38
Tabel 3.19 Beban Pegawai Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025	38

Tabel 3.20 Beban Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025	40
Tabel 3.21 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025	41
Tabel 3.22 Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025	42
 Tabel 4.1 Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Gender.....	45
Tabel 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Agama	46
Tabel 4.3 Data Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat PIM.....	46
Tabel 4.4 Data ASN Berdasarkan Golongan.....	46
Tabel 4.5 Daftar Nama Pejabat Struktural	47
Tabel 4.6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh



atas pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Salah satu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas laporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membuat catatan atas laporan keuangan sehingga memudahkan dalam memahami isi dari laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 96 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur penjabaran APBD Perubahan Tahun 2025;
22. Perbup No. 2 Tahun 2025: Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk memudahkan pemahaman, maka catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan



BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 3.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD

BAB V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Adapun Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan) SKPD

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	283,881,846,214.00	301.079.471.087,06	106.05
	(BPJT) Hotel	4,000,000,000.00	3,421,960,773.00	85.54
	(PBJT) Pajak Makanan dan / Atau Minuman	50,000,000,000.00	63,996,983,767.81	127.99
	(PBJT) Jasa Kesenian & Hiburan	500,000,000.00	621,760,703.00	124.35
	Pajak Reklame	1,559,093,507.00	1,800,337,420.00	115.47
	(PBJT) Tenaga Listrik	40,000,000,000.00	49,642,227,393.25	124.11
	(PBJT) Jasa Parkir	60,000,000.00	145,842,846.80	243.07
	Pajak Air Tanah	284,008,106.00	443,629,879.95	156.20
	Pajak Sarang Burung Walet	100,000,000.00	71,255,000.00	71.26
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24,000,000,000.00	40.427.330.444,25	168.44
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10,000,000,000.00	18.981.036.219,00	189.81
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43,158,200,000.00	10,511,740,477.00	24.35
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50,799,754,601,00	38.587.244.623,00	75,95
	Opsen Bea Balik Nama Bermotor Kendaraan Bermotor (BBNKB)	59,420,790,000,00	72.428.121.540,00	121,89
2	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	1.934.473.020,91	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman (PBJT)	0.00	109,117,724.91	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	24.603.859,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0.00	97.267,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	723.262.358,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.00	687.734.507,00	0.00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0.00	25.025.582,00	0.00
	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0.00	260.932.792,00	0.00
	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0.00	30.618.567,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0.00	303.000,00	0.00
	Jumlah	283,881,846,214.00	303,013,944,107.97	106.73

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Belanja) SKPD

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	656,562,000.00	310,873,140.00	47.35
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.00	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0.00	0.00	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.746.000,00	54.226.575,00	97.27
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.045.000,00	0.00	0.00
	Perubahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	114,684,000.00	13,923,918.00	12,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39,419,697,373.00	32,465,252,974.00	82.94



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,701,370,000.00	1,628,660,217.00	95.73
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	127,167,000.00	118,894,398.00	93.49
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6,520,000.00	0.00	0.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	294.400,000.00	208,258,200.00	70.74
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	364,640.00	0.00	0.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	821,372,000.00	709,785,075.00	86.41
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	660,748,400.00	561,054,801	84.91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205,239,000.00	153,700,000.00	74.89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454,544,000.00	423,477,696.00	93.17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,039,323,180.00	949,796,808.00	91.39
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651,157,292.00	625,417,990.00	96.05
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579,200,000.00	497,528,506.00	85.90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,028,436,192.00	6,349,285,077.00	90.34



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	669,179,000.00	579,195,700.00	86.55
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	439,710,000.00	393,280,000.00	89.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64,200,000.00	64,200,000.00	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,649,880.00	20,648,000.00	95.37
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	391,356,600.00	319,958,650.00	81.76
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	262,018,000.00	212,194,347.00	80.98
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,443,135,000.00	1,264,830,950.00	87.64
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2,762,680,840.00	1,949,963,960.00	70.58
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	601,701,000.00	325,863,536.00	54.16
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,500,295,000.00	1,380,317,000.00	92.00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	555,940,000.00	555,016,711.00	99.83
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	219,679,000.00	135,398,303.00	61.63
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	435.592.000,00	228.225.995,00	52.39
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	362.977.000,00	293.248.786,00	80.79
	Penagihan Pajak Daerah	691.697.000,00	616.397.831,00	89.11



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	335.948.400,00	259.568.778,00	77.26
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	513.975.000,00	303.472.801,00	59.04
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	365.973.600,00	286.223.458,00	78.21
Jumlah		65.488.283.401,00	54.258.140.181,00	82.85

2.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Shcedule* dengan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran dan Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
TA. 2025**

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	283.881.846.214,00	301.079.471.087,06	106,05
	Pajak Hotel /BPJT	4,000,000,000.00	3,421,960,773.00	85.54
	Pajak Restoran/BPJT	50,000,000,000.00	63,996,983,767.81	127.99
	Pajak Hiburan /BPJT	500,000,000.00	621,760,703.00	124.35
	Pajak Reklame	1,559,093,507.00	1,800,337,420.00	115.47
	(PBJT) Tenaga Listrik	40,000,000,000.00	49,642,227,393.25	124.11
	(PBJT) Jasa Parkir	60,000,000.00	145,842,846.80	243.07
	Pajak Air Tanah	284,008,106.00	443,629,879.95	156.20
	Pajak Sarang Burung Walet	100,000,000.00	71,255,000.00	71.26
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24,000,000,000.00	40.427.330.444,25	168.44
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10,000,000,000.00	18.981.036.219,00	189.81
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43,158,200,000.00	10,511,740,477.00	24.35
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50,799,754,601,00	38.587.244.623,00	75,95
	Opsen Bea Balik Nama Bermotor Kendaraan Bermotor (BBNKB)	59,420,790,000,00	72.428.121.540,00	121,89
2	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	1.934.473.020,91	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman (PBJT)	0.00	109,117,724.91	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	24.603.859,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0.00	97.267,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	723.262.358,00	0.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.00	687.734.507,00	0.00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0.00	25.025.582,00	0.00
	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0.00	260.932.792,00	0.00
	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0.00	30.618.567,00	0.00
	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0.00	303.000,00	0.00
Jumlah		283,881,846,214.00	303,013,944,107.97	106.73

Realisasi Pendapatan daerah dari sektor pajak daerah pada tahun 2025 ditetapkan dalam APBDP 2025 sebesar Rp.283.881.846.214,00 terdiri dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah dan 2 (dua) Opsen. Adapun realisasinya mencapai Rp. 301.083.038.431,06 atau mencapai sebesar 106,05 % dari target dan 49,95 % dari tahun sebelumnya. Dengan raihan pendapatan terbesar berasal dari pendapatan pajak restoran, pajak Tenaga listrik dan Opsen Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dari sebelas jenis penerimaan pajak daerah yang dipungut Bapenda Kutai Timur, delapan jenis pajak dan satu Opsen BBNKB melampaui target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat khususnya wajib pajak terhadap pemerintah dan semakin mudahnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui aplikasi SIP-PAD yang didukung semakin banyaknya kanal-kanal pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar pajak serta upaya-upaya Bapenda Kabupaten Kutai Timur dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan peran dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah, namun demikian masih ada satu jenis pajak yang tidak melampaui target walaupun sebenarnya potensinya



terhitung besar yaitu pajak minerba atau MBLB yang masih terkendala kurangnya optimalisasi dalam pemungutannya.

Peningkatan dan penurunan realisasi pendapatan pajak daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan pajak hotel pada tahun 2025 sebesar Rp 3.421.960.773,00 dengan target pajak hotel Rp.4.000.000000,00 atau 85,54 % turun sekitar 1,73% dibandingkan perolehan pajak tahun 2024 penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah okupansi tamu dan hotel khususnya Hotel Royal Victoria dan Q hotel.

2. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan pajak restoran pada tahun 2025 sebesar Rp. 63.996.983.767,81 mengalami kenaikan sebesar 13,52% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2024. Target pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp.50.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 63.996.983.767,81 surplus 127,99%. Kenaikan ini di sebabkan beberapa alasan antara lain:

1. Terjadinya kenaikan omzet dengan bertambahnya pengunjung rumah makan dan restoran
2. Meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berkat upaya sosialisasi mengenai pajak daerah yang dilakukan sepanjang tahun 2025
3. Diadakanya acara Reward Pajak Daerah sebagai apresiasi bagi wajib pajak yang selalu patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Semakin optimalnya penggunaan aplikasi pembayaran pajak daerah online melalui SIP-PAD sehingga memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya



3. Pajak Hiburan

Target pajak hiburan tahun 2025 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi Rp.621.760.703,00 atau 124,35% realisasi ini meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 16,78 % kenaikan dan capaian target pajak hiburan tersebut disebabkan oleh:

1. Sosialisasi yang dilakukan Bapenda Kutai Timur mengenai pajak daerah dan aplikasi pembayaran pajak daerah melalui digitalisasi daerah dengan memperbanyak kanal pembayaran pajak salah satunya melalui Qris yang dilakukan selama tahun 2025.
2. Meningkatnya pengunjung tempat hiburan

4. Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame pada tahun 2025 sebesar Rp 1.800.337.420,00 mengalami penurunan sebesar 8,60 % jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Reklame pada tahun 2024, raihan pajak reklame tahun 2025 sebesar 115,47% dari target yang ditetapkan yaitu Rp.1.559.093.507,00 penurunan realisasi pendapatan Pajak Reklame tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kegiatan pendataan secara rutin dan periodik oleh tim pendataan terhadap objek pajak reklame di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur belum menambah penerimaan pajak reklame tahun 2025 karena dilakukan diakhir tahun 2025 sehingga jatuh tempo pembayarannya pada tahun berikutnya.
- 2) Upaya penagihan aktif yang dilakukan Bapenda untuk mengingatkan wajib pajak yang telah jatuh tempo untuk segera melunasi pajak terutangnya belum berjalan optimal.



5. Pajak Penerangan Jalan

Target pajak penerangan jalan tahun 2025 Rp.40.000.000.000,00 dengan realisasi Rp.49.642.227.393,25 atau mencapai 124,10% dari target dan 14,38% lebih tinggi dari realisasi tahun 2024. kenaikan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan tersebut disebabkan oleh:

1. PPJ PLN, Bertambahnya jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kutai Timur sehingga bertambah pula jumlah pembayaran pajak penerangan jalan PLN.
2. Penagihan aktif dan pengecekan ke lapangan penggunaan penerangan Jalan non PLN ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur.

6. Pajak Parkir

Realisasi pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2025 sebesar Rp 145.842.846,80,00 dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 60.000.000,00 mencapai 243,07% mengalami kenaikan sebesar 216,67% dari tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi pendapatan pajak parkir tersebut disebabkan bertambahnya Pengguna jasa parkir yang ada di Sangatta Trade Center (STC) baik roda dua maupun roda empat khususnya dengan semakin ramai dibukanya pusat makan dan jajanan baru di daerah STC dan sekitarnya.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Target pajak air bawah tanah 2025 Rp.284.008.106,00 dengan realisasi mencapai Rp.443.629.879,95 atau 156,20% dari target dan turun sebesar 219,53% dari tahun 2024 penurunan realisasi pendapatan Pajak Air Bawah Tanah tersebut disebabkan oleh menurunnya penggunaan volume air bawah tanah perusahaan-perusahaan di kutim.



8. Pajak Sarang Burung Walet

Target pajak sarang burung walet tahun 2025 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi Rp.71.255.000,00 atau sekitar 71,25 % dari target dan lebih kecil 30,92 % dari tahun sebelumnya. penurunan realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet yang signifikan tersebut disebabkan masih belum optimalnya pendataan dan penagihan aktif untuk pajak sarang Burung walet dikarenakan masih sulitnya mencari pemilik dari sarang burung walet.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2025 sebesar Rp 40.427.330.444,25 mencapai 168,44% dari target pajak MBLB tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 kenaikan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut disebabkan adanya upaya bersama dengan pihak provinsi dalam pencarian subjek pajak baru dan penagihan terhadap wajib pajak MBLB yang telah ada.

10 .Pajak Bumi dan Bangunan Desa/ Kota (PBB P2)

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi penerimaannya untuk tahun 2025 sebesar Rp.18.980.837.166,00 atau sekitar 189,80%, Terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (P2) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 169,38% pencapaian dan peningkatan tersebut diakibatkan beberapa sebab antara lain:



1. Pembayaran pajak bumi dan bangunan terutang dari wajib pajak PBB P2
2. Optimalnya penagihan Pajak bumi dan Bangunan untuk wajib pajak Perusahaan, sehingga penerimaan PBB P2 lebih besar dari tahun sebelumnya.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi pendapatan BPHTB tahun 2025 Rp.10.511.740.477,00 dengan target tahun 2025 sebesar Rp.43.158.200.000,00 atau tercapai sebesar 24,35%, menurunt sebesar 87,20% dibanding tahun sebelumnya penurunan pencapaian target pajak BPHTB tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya pembayaran HGU yang jatuh tempo tahun 2025.

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maka peran serta masyarakat dalam membayar pajak pun semakin meningkat. dukungan kemudahan penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan dan digitalisasi pembayaran pajak semakin memudahkan para wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

3.1.2 Belanja

Belanja pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Laporan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah
TA. 2025 dan TA. 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			(Rp)	%	
1	Belanja Operasi	63,391,582,099.00	52,278,365,381.00	82.47	49,802,066,145.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Belanja Pegawai	39,419,697,373.00	32,465,252,974.00	82.36	20,449,665,975.00
	Belanja Barang dan Jasa	23,971,884,726.00	19,813,112,407.00	82.65	29,352,400,170.00
2	Belanja Modal	2,096,701,302.00	1,978,914,800.00	94.38	5,146,560,600.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	1,899,701,302.00	1,783,114,800.00	93.86	4,102,454,600.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	00.00	00.00	00.00	899,606,000.00
	Belanja Aset Lainnya	197,000,000.00	195,800,000.00	99.39	144,500,000.00
Jumlah		65,488,283,401.00	54,257,280,181.00	82.85	54,948,626,745.00

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp54.257,280,181.00 atau 82.85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp65,488,283,401.00. Hal ini berarti, terjadi penurunan belanja sebesar Rp11,231,003,220.00 atau 17,15% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp54,948,626,745.00.

3.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pegawai Badan Pendapatan Daerah
TA. 2025 dan TA. 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			(Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10,577,089,388.00	8,037,195,199.00	75.99	5,383,090,830.00
	Belanja Gaji Pokok ASN	5,401,760,000.00	4,296,933,386.00	79.55	3,784,967,147.00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	925,517,852.00	540,600.384.00	58.41	384,090,706.00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218,833,500.00	151,270,000.00	69.13	159,190,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	382,645,664.00	108,320,000.00	28.31	165,890,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	427,185,000.00	282,623,711.00	66.16	142,580,000.00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	559,663,166.00	359,348,040.00	64.21	231,816,420.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			(Rp)	%	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,960,888.00	3,075,714.00	51.60	2,536,624.00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	189,236.00	99,930.00	52.81	53,694.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	28,842,607,985.00	24,428,057,775.00	84.69	8,094,176,556.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14,648,515,675.00	13,415,464,306.00	91.58	8,094,176,556.00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14,194,092,310.00	11,012,593,469.00	77.59	.00
Jumlah		53,613,789,683.00	43,477,846,443.00	81.00	20,449,665,975.00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp 43,477,846,443.00 atau 81.09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 53,613,789,683.00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar Rp10,135,943,240.00 atau 49,57% jika dibanding dengan belanja pegawai tahun 2024 yang sebesar Rp 20,449,665,975.00

3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Badan Pendapatan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah
TA. 2025 dan TA. 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	4,070,000,174.00	3,375,662,977.00	82.94	5,343,915,800.00
2	Belanja Jasa Kantor	6,879,277,152.00	6,136,076,088.00	89.20	7,616,843,043.00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,925,800,000.00	4,410,917,080.00	89.55	2,199,996,000.00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	00.00	00.00	00.00	24,250,000.00
5	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	00.00	00.00	00.00	155,768,520.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			(Rp)	%	
6	Belanja sewa Tanah	37,500,000.00	00.00	00.00	00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	00.00	00.00	00.00	2,500,000.00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	00.00	00.00	00.00	101,580,000.00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	112,500,000.00	00.00	00.00	00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	00.00	00.00	00.00	1,670,060,000.00
11	Belanja Sewa Tdk Terwujud	155,768,520.00	00.00	00.00	.00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	684,615,000.00	637,980,000.00	93.19	706,499,000.00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21,649,880.00	20,648,000.00	95.37	1,541,936,600.00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75,000,000.00	74,969,567.00	99.96	215,300,000.00
15	Belanja Pemeliharaan Aset Tdk Terwujud	99,600,000.00	98,000,000.00	98,39	.00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,910,174,000.00	5,058,858,695.00	73.21	9,773,751,207.00
Jumlah		23,971,884,726.00	19,813,112,407.00	82.65	29,352,400,170.00

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 19,813,112,407.00 atau 82,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 23,971,884,726.00. Hal ini berarti, terjadi penurunan belanja barang dan jasa sebesar Rp 4,158,772,319.00 atau minus 14,17% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp 29,352,400,170.00.

3.1.2.3 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,899,701,302.00	1,783,114,800.00	93.86	5,146,560,600.00
	Belanja alat kantor dan rumah tangga	581,309,292.00	556,597,990.00	95.75	3,475,804,600.00
	Belanja modal mebel	165,003,272.00	157,939,989.00	95.72	3,043,634,600.00
	Belanja modal Alat pembersih	0.00	0.00	0.00	15,800,000.00
	Belanja modal Alat Pendingin	181,920,000.00	171,828,000.00	94.45	122,100,000.00
	Belanja modal Alat rumah tangga lainnya (Home Use)	234,386,020.00	226,830,001.00	96.78	0.00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi,dan pemancar	169,517,000.00	101,920,000.00	60.12	65,000,000.00
3	Belanja Modal Komputer	1,148,875,010.00	1,124,596,810.00	97.89	509,650,000.00
	Belanja Modal Komputer unit	884,968,180.00	879,183,602.00	99.35	257,400,000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	263,906,830.00	245,413,208.00	92.99	252,250.000.00
4	Belanja Modal Gedung dan bangunan	0.00	0.00	0.00	899,606,000.00
5	Belanja Modal asset lainnya	197,000,000.00	195,800,000.00	99.39	144,500,000.00
	Belanja Modal asset tdk berwujud Software	197,000,000.00	195,800,000.00	99.39	144,500,000.00
Jumlah		2,096,701,302.00	1,978,914,800.00	94.38	5,146,560,600.00

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,978,914,800.00 atau 94,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2,096,701,302.00. Hal ini berarti, terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp117,786,502.00 atau minus 2.29% jika dibanding dengan belanja tahun 2024 yang sebesar Rp5,146,560,600.00

3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

3.2.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu tahun periode akuntansi. Total aset lancar yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari :



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 3.6 Aset Lancar Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
3	Piutang Pajak Daerah	45.349.884.864,20	36.670.189.992,65
4	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(10.686.827.197,05)	(6.882.550.535,47)
5	Beban dibayar dimuka	1,224,974,400.00	1,466,664,000.00
6	Persediaan	0.00	0.00
Jumlah Aset Lancar		35.888.231.120,15	31.254.303.457,18

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

c. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.670.189.992,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir
1	Pajak Hotel	2025	5,727,000.10	404,828,901.00	5,727,000.00	404,828,901.10
		2025	0.00	404,828,901.00	0.00	404,828,901.00
		2024	737,000.00	0.00	737,000.00	0.00
		2023	4,990,000.00	0.00	4,990,000.00	0.00
		2022	0.10	0.00	0.00	0.10
2	Pajak Restoran	2025	3,833,291,543.10	1,905,325,254.00	1,895,766,077.00	3,842,850,720.10
		2025	0.00	1,905,325,254.00	0.00	1,905,325,254.00
		2024	3,145,044,645.70	0.00	1,859,807,156.00	1,285,237,489.70
		2023	223,444,400.00	0.00	13,752,100.00	209,692,300.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir
		2022	464,802,497.40	0.00	22,206,821.00	442,595,676.40
3	Pajak Hiburan	2025	59,383,336.00	3,695,000.00	0.00	63,078,336.00
		2025	0.00	3,695,000.00	0.00	3,695,000.00
		2022	59,383,336.00	0.00	0.00	59,383,336.00
4	Pajak Reklame	2025	369,484,550.00	591,428,280.00	84,799,000.00	876,113,830.00
		2025	0.00	591,428,280.00	0.00	591,428,280.00
		2024	238,516,900.00	0.00	75,159,000.00	163,357,900.00
		2023	114,371,400.00	0.00	9,640,000.00	104,731,400.00
		2022	8,165,000.00	0.00	0.00	8,165,000.00
		2021	1,431,250.00	0.00	0.00	1,431,250.00
		2017	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		2016	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5	Pajak Penerangan Jalan	2025	53,297,213.50	175,775,591.50	18,618,750.00	210,454,055.00
		2025	0.00	175,775,591.50	0.00	175,775,591.50
		2024	53,297,212.50	0.00	18,618,750.00	34,678,462.50
		2023	1.00	0.00	0.00	1.00
6	Pajak Parkir	2025	0.00	0.00		0.00
7	Pajak Air Tanah	2025	6,189,351.95	13,694,520.00	281,001.95	19,602,870.00
		2025	0.00	13,694,520.00	0.00	13,694,520.00
		2024	6,189,350.00	0.00	281,000.00	5,908,350.00
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022	0.15	0.00	0.15	0.00
		2021	1.80	0.00	1.80	0.00
8	Pajak Sarang Burung Walet	2025	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2025	22,687,500.00	38,921,725.00	0.00	61,609,225.00
		2025	0.00	38,921,725.00	0.00	38,921,725.00
		2024	22,687,500.00	0.00	0.00	22,687,500.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2024	32,320,129,498.00	13,425,267,281.00	5,874,049,852.00	39,871,346,927.00
		2025	0.00	13,425,267,281.00	0.00	13,425,267,281.00
		2024	13,482,377,760.00	0.00	4,313,479,797.00	9,168,897,963.00
		2023	8,424,758,608.00	0.00	436,054,352.00	7,988,704,256.00
		2022	8,028,501,256.00	0.00	329,183,571.00	7,699,317,685.00
		2021	858,250,336.00	0.00	222,390,193.00	635,860,143.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir
		2020	644,917,068.00	0.00	164,662,133.00	480,254,935.00
		2019	274,189,034.22	0.00	138,729,522.00	135,459,512.22
		2018	422,008,896.78	0.00	126,419,895.00	295,589,001.78
		2017	185,126,539.00	0.00	143,130,389.00	41,996,150.00
11	BPHTB	2024	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah			36,670,189,992.65	16,558,936,552.50	7,879,241,680.95	45,349,884,864.20

Penjelasan piutang pajak daerah pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang pajak hotel per 31 Desember 2025 sebesar Rp404,828,901.00. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang pajak hotel tahun 2024 sebesar Rp5,727,000.10 ada kenaikan sebesar Rp399,101,901.00. yaitu karena ada mutasi tambah piutang pajak hotel sebesar Rp404,828,901.00. yang merupakan piutang baru tahun 2025 dan mutasi kurang sebesar Rp 5,727,000.10

2) Piutang Pajak Restoran

Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp3,842,850,720.10. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp3,833,291,543.10. ada kenaikan sebesar Rp1,905,325,254.00. yaitu karena ada mutasi tambah piutang pajak restoran sebesar Rp3.145.044.645,70 yang merupakan piutang baru tahun 2024 dan mutasi kurang sebesar Rp1,859,807,156.00 yang terdiri dari koreksi saldo awal piutang sebesar Rp1,285,237,489.70 dan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.249.186.236,00.

3) Piutang Pajak Hiburan

Saldo piutang pajak hiburan per 31 Desember 2025 sebesar Rp63,078,336.00. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang pajak hiburan tahun 2024 sebesar Rp59,383,336.00 ada berkurang sebesar Rp 3.695,000.00 karena ada mutasi kurang atas pembayaran piutang tahun sebelumnya.



4) Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp591,428,280.00. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp0.00, ada kenaikan sebesar Rp591,428,280.00, yaitu karena adanya mutasi tambah piutang pajak reklame sebesar Rp591,428,280.00 yang merupakan piutang baru tahun 2025.

5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2025 sebesar Rp175,775,591.50. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang pajak penerangan jalan tahun 2024 sebesar Rp0.00, yaitu karena adanya mutasi tambah piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp175,775,591.50 yang merupakan piutang baru tahun 2025.

6) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13,694,520.00. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang pajak air tanah tahun 2024 sebesar Rp0.00, ada kenaikan sebesar Rp13,694,520.00, yaitu karena adanya merupakan piutang baru tahun 2025.

7) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 38,921,725.00 yang merupakan piutang baru tahun 2025.

8) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Saldo piutang PBB P2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.320.129.498,00. Bila dibandingkan dengan jumlah piutang PBB P2 tahun 2024 sebesar Rp0.00, yaitu karena adanya mutasi tambah piutang PBB P2 sebesar Rp32.320,129,498,00 yang merupakan piutang baru tahun 2025.



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

d. Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.686.827.197,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah TA. 2025

No	Jenis Piutang	Tahun	Saldo Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Tahun (0,5%) Lancar	1 s.d. 2 Tahun (10%) Kurang Lancar	2 s.d. 5 Tahun (50%) Diragukan	Diatas 5 Tahun (100%) Macet	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Saldo Piutang TA. 2025	Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8	10 = 4-9	11
1	Pajak Hotel	2022	0.10			0.05		0.05	0.05	Diragukan
		2023	0,00		4,990,000.00			4,990,000.00	4,990,000.00	Kurang Lancar
		2024	0,00		737,000.00				737,000.00	Lancar
		2025	404,828,901.00		404,828,901.00				0.00	Kurang Lancar
2	Pajak Restoran	2022	442,595,676.40		22,206,821.00			442,595,676.40	464,802,497,40	Diragukan
		2023	209,692,300.00		13,752,100.00				223,444,400.00	Kurang Lancar
		2024	2,85,237,489.70		1,859,807,156.00			1,859,807,156.00	3,145,044,645,70	Kurang Lancar
		2025	3,842,850,720.10	1,895,766,077.00				1,905,325,254.00	3,833,291,543.10	Kurang Lancar
3	Pajak Hiburan	2022	59,383,336.00	0.00		0.00		0.00	59,383,336.00	Kurang Lancar
		2025	63,078,336.00		3,695,000.00				59,383,336.00	Kurang Lancar
4	Pajak Reklame	2016	4.000.000.00	0.00				0.00	4.000.000.00	lancar
		2017	3.000.000.00	0.00				0.00	3.000.000.00	Lancar
		2021	1.431.250.00	0.00				0.00	1.431.250.00	Lancar
		2022	8.165.000.00	0.00				0.00	8.165.000.00	Lancar
		2023	104.731.400.00		9.640.000.00				114.371.400.00	Kurang Lancar
		2024	163.357.900.00		75.159.000.00				238.516.900.00	Kurang Lancar
		2025	591.428.280.00		591.428.280.00				0.00	Kurang Lancar
5	Pajak Penerangan Jalan	2023	1.00		0.00			0.00	1.00	Kurang Lancar
		2024	34,678,462,50	18,618,75000					53,297,212,50	Lancar
		2025	175,775,591.50		175,775,691.50				0.00	Kurang Lancar
6	Pajak Parkir	2025	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	Lancar
7	Pajak Air Tanah	2021	1.80			0.90		0.90	0.90	Diragukan
		2022	0.15			0.08		0.08	0.08	Diragukan
		2024	6,189,350.00	281,000.00				281,000.00	5,908,350.00	Lancar
		2025	13.964.520.00					13.964.520.000	0.00	Lancar



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Piutang	Tahun	Saldo Per 31 Desember 2025	0 s.d. 1 Tahun (0,5%) Lancar	1 s.d. 2 Tahun (10%) Kurang Lancar	2 s.d. 5 Tahun (50%) Diragukan	Diatas 5 Tahun (100%) Macet	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Saldo Piutang TA. 2025	Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8	10 = 4-9	11
8	Pajak Sarang Burung Walet	2025	0.00					0.00	0.00	Lancar
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2024	22,687,500.00	0.00				0.00	22,687,500.00	Lancar
		2025	38.921.725.00					38.921.725.00	0.00	Lancar
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2017	185,126,539.00					143.130.389.00	41.996.150.00	Macet
		2018	422,008,896.78				422,008,896.78	422,008,896.78	0.00	Macet
		2019	274,189,034.22				274,189,034.22	274,189,034.22	0.00	Macet
		2020	644,917,068.00			322,458,534.00		322,458,534.00	322,458,534.00	Diragukan
		2021	858,250,336.00			429,125,168.00		429,125,168.00	429,125,168.00	Diragukan
		2022	8,028,501,256.00			4,014,250,628.00		4,014,250,628.00	4,014,250,628.00	Diragukan
		2023	8,424,758,608.00		842,475,860.80			842,475,860.80	7,582,282,747.20	Kurang Lancar
		2024	13,482,377,760.00	67,411,888.80				67,411,888.80	13,414,965,871.20	Lancar
		2025	13.425.267.281.00					13.425.267.281.00	0.00	Lancar
11	BPHTB	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah			46349.884.864.20	16.558.936.552.50	876,756,440.90	5,032,725,372.73	888,324,470.00	10.686.827.197.05	36,670,189,992.65	

e. Persediaan

Saldo persediaan pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Persediaan Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2025	BELANJA PERSEDIAAN	PEMAKAIAN PERSEDIAAN	REKLASIFIKASI BELANJA DILUAR BELANJA PERSEDIAAN	SALDO AKHIR PERSEDIAAN
1	PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0.00	396,524,000.00	307,814,200.00	77.63	487,893,900.00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	122,440,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.00	574,466,814.00	515,370,745.00	89.71	159,900,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.00	180,410,000.00	174,150,000.00	96.53	197,750,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	490,108,000.00	481,967,550.00	98.34	1,346,116,900.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0.00	72,000,000.00	45,000,000.00	62.50	29,000,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0.00	343,158,000.00	263,382,000.00	76.75	53,600,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0.00	330,059,000.00	322,499,881.00	97.71	492,800,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0.00	53,886,360.00	49,800,000.00	92.42	47,880,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	570,486,600.00	429,344,600.00	75.26	308,985,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0.00	330,752,000.00	266,712,000.00	80.64	342,199,000.00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	294,400,000.00	208,258,200.00	70.74	0.00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0.00	609,231,000.00	609,231,000.00	0.00	609,231,000.00
	Belanja Pakaian Adat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	620,370,000.00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250,000.00
	Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	477,500,000.00
	JUMLAH	0.00	4,245,481,774.00	3,365,715,976.00	0.00	0.00
2	PERSEDIAAN BARANG TAK PAKAI HABIS					
	KOMPONEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P I P A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PERSEDIAAN BARANG BEKAS DIPAKAI					
	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PERSEDIAAN (1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau setahun yang kepemilikannya digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan



masyarakat. Aset tetap yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dan per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.10 Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Selisih
Tanah	1,552,500,000.00	1,552,500,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin	26.938.906.759,00	23.731.516.409,00	3,207,390,350.00
Gedung dan Bangunan	11,492,230,064.00	11.492.230.064,00	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(18.631.808.168,11)	(15.473.045.357,55)	(3,158,762,810.56)
Jumlah	24.526.191.465,45	21.303.201.115,45	3,222,990,350.00

Penjelasan atas aset tetap dari tabel di atas sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.552.500.000.00 adalah nilai jumlah tanah yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur bila dibandingkan tahun 2024 tidak ada peningkatan untuk aset tanah ini. Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan neraca.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai aset untuk peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.938.906.759,00 antara lain alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat



komunikasi digital dan konvensional dan alat keselamatan kerja yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, bila dibandingkan nilai aset tahun 2024 Rp23.731.516.409,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.207,390,350.00 sesuai dengan Realisasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin.

c. Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.492.230.064,00 adalah nilai jumlah gedung dan bangunan yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Bila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2024 sebesar Rp11.492.230.064,00. Tidak ada perubahan

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 adalah nilai jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur bila dibandingkan tahun 2024 tidak ada peningkatan untuk aset ini. Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan neraca.

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.864.234.455,33 adalah nilai jumlah aset tetap lainnya yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan Pendapatan



Daerah Kabupaten Kutai Timur. Bila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2024 sebesar Rp7.540.270.022,00. agak besar di banding pada tahun 2025.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 adalah nilai yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2024.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 18.631.808.168,10. dari sejumlah nilai aset yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah. Akumulasi penyusutan mengurangi nilai aset tetap dalam neraca.

Jumlah aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.631.808.168,10 sebelum dikurangi nilai akumulasi penyusutan. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp15.473.045.357,55 nilai aset tetap menjadi sebesar Rp.21.351.828.654,90.

**Tabel 3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah
TA. 2025 dan TA. 2024**

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2025
1	Peralatan dan Mesin	(12.811.150.339,50)	2,928,918,209.27	0.00	(15,740,068,548.77)
2	Gedung dan Bangunan	(2.661.895.018,05)	229,844,601.28	0.00	(2.891.739.619,33)
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		15,473,045,357.55	3,158762,810.55	0.00	18,631,808,168.10

3.2.4 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.528.056.122,00. Bila dibandingkan dengan jumlah aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp7.329.645.022,00 ada penurunan sebesar Rp801.588,900.00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 3.12 Aset Lainnya Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

No	Aset Lainnya	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2025
1	Aset Tak Berwujud	1.388.350.000,00	195.800.000.00	0.00	1,192,550,000.00
2	Aset Lain-Lain	7.329.645.022,00		801.588,900.00	6.528.056.122,00.
4	Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Rugi)	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(981.925.000,00)	(70,246,667.00)	0.00	(1.052.171.666,67)
JUMLAH		7.540.270.022,00	226,046,667.00	801.588,900.00	6.864.234.455,33

3.2.5 Kewajiban

Nilai kewajiban jangka pendek pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 adalah Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp607.723.651,67 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13 Nilai Kewajiban Jangka Pendek Badan Pendapatan Daerah TA. 2025 dan TA. 2024

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2025
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	574,466,239.33	33,257,412.00		607.723.651,67
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		574,466,239.33	33,257,412.00	0.00	607.723.651,67

a. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah reklame pada Badan Pendapatan Daerah yang diterima pada tahun 2025, namun hak atas pembayaran pajaknya masih belum diterima subjek pajak karena masa pajaknya melewati tahun berjalan yaitu sebesar Rp607.723.651,67 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3.14 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka Badan Pendapatan Daerah
TA. 2025 dan TA. 2024**

No	Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo Awal 2025	Realisasi Pendapatan LRA 2025	Realisasi Pendapatan LO 2024	Saldo Akhir 2025
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	574,466,239.33	1.589.988.670,00	2.063.360.537,66	607.723.651,67
Jumlah		574,466,239.33	1.589.988.670,00	2.063.360.537,66	607.723.651,67

3.2.6 Ekuitas

Saldo Ekuitas Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp312.253.035.452,68

3.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

3.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun pendapatan-LO Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp310.074.119.362,27 atau mengalami kenaikan sebesar Rp96,181,814,077.70 atau 44,56% dari Tahun 2024 sebesar Rp96.181.814.077.

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp312.008.592.383,18 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp310.074.119.362,27 dan Lain-lain PAD yang Sah – LO sebesar Rp1.934.473.020,91 Rp86.449.059.613,02 atau 66,82% dari Tahun 2023 sebesar Rp129.377.718.692,46.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,0.



3.3.2 Beban-LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Adapun beban-LO Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.568.941.119,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.008.139.255,38 atau 9,18% dari Tahun 2024 sebesar Rp54.560.801.864,42 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15 Beban-LO Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025

No	Beban – LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	32.465.252.974,00	20.449.665.975,00	12.015.586.999,00	58,76
2	Beban Barang dan Jasa	20.070.402.007,00	29.125.632.190,00	(9.055.230.183,00)	(31,09)
3	Beban Penyisihan Piutang	3.804.276.661,58	4.074.220.095,19	(269.943.433,61)	(6,63)
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.229.009.477,22	911.283.604,23	2.317.725.872,99	254,34
Jumlah		59.568.941.119,80	54.560.801.864,42	5.008.139.255,38	9,18

a. Beban Pegawai

Secara keseluruhan Beban Pegawai Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp32,465,252,974.00 mengalami kenaikan sebesar Rp12,015,586,999.00 atau 58,76% dari tahun 2024 sebesar Rp20,449,665,,975.00, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Beban Pegawai Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025

No	Beban Pegawai - LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	4.024.264.381,00	4.029.771.800,00	(5.507.419,00)	(0,14)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	2.567.593.039,00	267.161.586,00	2.300.431.453,00	861,06
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	362.262.346,00	358.338.994,00	3.923.352,00	1,09
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	178.338.038,00	25.751.712,00	152.586.326,00	592,53



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Beban Pegawai - LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	151.270.000,00	159.190.000,00	(7.920.000,00)	(4,98)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	63.660.000,00	125.500.000,00	(61.840.000,00)	(49,27)
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	44.660.000,00	40.390.000,00	4.270.000,00	10,57
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.095.000,00	142.580.000,00	(485.000,00)	(0,34)
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	140.528.711,00	0,00	140.528.711,00	100,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	210.597.360,00	212.407.860,00	(1.810.500,00)	(0,85)
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	148.750.680,00	19.408.560,00	129.342.120,00	666,42
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.075.714,00	2.536.624,00	539.090,00	21,25
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.694,00	48.622,00	(4.928,00)	(10,14)
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	56.236,00	5.072,00	51.164,00	1.008,75
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.040.540.850,00	7.751.016.556,00	289.524.294,00	3,74
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.374.923.456,00	343.160.000,00	5.031.763.456,00	1.466,30
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	73.995.227,00	0,00	73.995.227,00	100,00
18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	13.479.143,00	0,00	13.479.143,00	100,00
19	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.898.417,00	0,00	1.898.417,00	100,00
20	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.139.050.000,00	0,00	1.139.050.000,00	100,00
21	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	474.604.167,00	0,00	474.604.167,00	100,00
22	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	307.245.923,00	0,00	307.245.923,00	100,00
23	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.373.952.000,00	0,00	4.373.952.000,00	100,00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Beban Pegawai - LO	Saldo LO TA 2025 (Rp)	Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.808.233.140,00	0,00	1.808.233.140,00	100,00
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.820.135.452,00	0.00	2.820.135.452,00	100.00
Jumlah		32,465,252,974.00	16,277,994,278.00	16,187,258,696	99.44

b. Beban Barang dan Jasa

Secara keseluruhan Beban Barang dan Jasa-LO Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.070.402.007,00 mengalami penurunan sebesar Rp(9.055.230.183,00) atau minus (31,09)% dari tahun 2024 sebesar Rp29.125.632.190,00

Terdapat perbedaan antara saldo Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO karena adanya mutasi tambah yaitu jurnal balik beban sewa kendaraan tahun 2025 sebesar Rp3.847.482.719,00 ,yang secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Beban Barang dan Jasa Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025

No	Beban Barang dan Jasa	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
		Saldo LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
1	Beban Barang Pakai Habis	3.375.662.977,00			3.375.662.977,00	5.343.915.800,00	(1,968,252,823.00)	(36,83)
2	Beban Jasa Kantor	6.136.076.088,00			6.136.076.088,00	7.616.843.043,00	(1.480.766.955,00)	(19,44)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.652.606.680,00			4.652.606.680,00	1.973.228.020,00	2.679.378.660,00	135,79
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0.00			0.00	24.250.000,00	(24.250.000,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	74,969,567.00			74,969,567.00	215.300.000.00	(140,330,433,0.00)	(65.18)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0.00			0.00	2.500.000.00	(2.500.000.00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0.00			0.00	101,580,000.00	(101,580,000.00)	(100,00)
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0.00			0.00	1.670.060.000,00	(1.670.060.000,00)	(100,00)



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Beban Barang dan Jasa	TA 2025 (Rp)				Saldo LO TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
		Saldo LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo LO			
9	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	637.980.000,00			637.980.000,00	706.499.000,00	(68.519.000,00)	(9,70)
10	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.648.000,00			20.648.000,00	1.541.936.600,00	(1.521.288.600,00)	(98,66)
11	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.969.567,00			74.969.567,00	215.300.000,00	(140.330.433,00)	(65,18)
12	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.058.858.695,00			5.058.858.695,00	9.773.751.207,00	(4.714.892.512,00)	(48,24)

c. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.804.276.661,58 dengan selisih sebesar Rp(269.943.433,61) dari tahun 2024 yang sebesar Rp4.074.220.095,19 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.18 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah
Per 31 Desember 2025**

No	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.521.459,51	318.605,04	1.202.854,47	377,54
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	193.723.451,51	208.059.180,66	(14.335.729,15)	(6,89)
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	18.475,00	18.477.513,50	(18.459.038,50)	(99,90)
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	59.744.531,90	10.290.067,90	49.454.464,00	480,60
5	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	4.080.238,55	(30.574,86)	4.110.813,41	(13.445,08)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	628.359,87	7.416,26	620.943,61	8.372,73
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.349.921,13	113.437,50	2.236.483,63	1.971,56
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.542.210.224,11	3.836.984.449,19	(294.774.225,08)	(7,68)
Jumlah		56.339.931.642,58	53.649.518.260,19	2.690.413.382,39	5,01

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Badan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.229.009.477,22 dengan selisih sebesar Rp2.317.725.872,99 dari tahun 2024 yang sebesar Rp911.283.604,23 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.19 Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Pendapatan Daerah
Per 31 Desember 2025**

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2025	TA 2024	Selisih
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.928.918.209,27	521.444.909,62	2.407.473.299,65
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	229.844.601,28	221.517.861,28	8.326.740,00
3	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	70.246.666,67	168.320.833,33	(98.074.166,66)
Jumlah		3.229.009.477,22	911.283.604,23	2.317.725.872,99

3.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 59.523.308.355,30 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO sebesar minus Rp252,439,651263.38

merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

c. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 248.756.464.873,97

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Perhitungan koreksi nilai persediaan tahun 2025 sebesar Rp0,00. Selisih revaluasi asset tetap sebesar Rp0,00. Koreksi ekuitas piutang pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp (348.210.816,00). sumber lain



Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp(336.236.000,00).
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. (2.181.059.100,00)

Koreksi Ekuitas-Penghapusan Aset Rusak Berat/usang sebesar Rp
(2.181.059.100,00)

e. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2024 Rp**59.523.308.355,30** merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2025. Nilai pada ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp 63.496.570.578,71 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah surplus/defisit-LO ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan dan dampak kumulatif kebijakan kesalahan mendasar.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 untuk informasi – informasi non keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Gambaran Umum

Dasar pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan unsur penunjang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

4.2 Susunan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari :

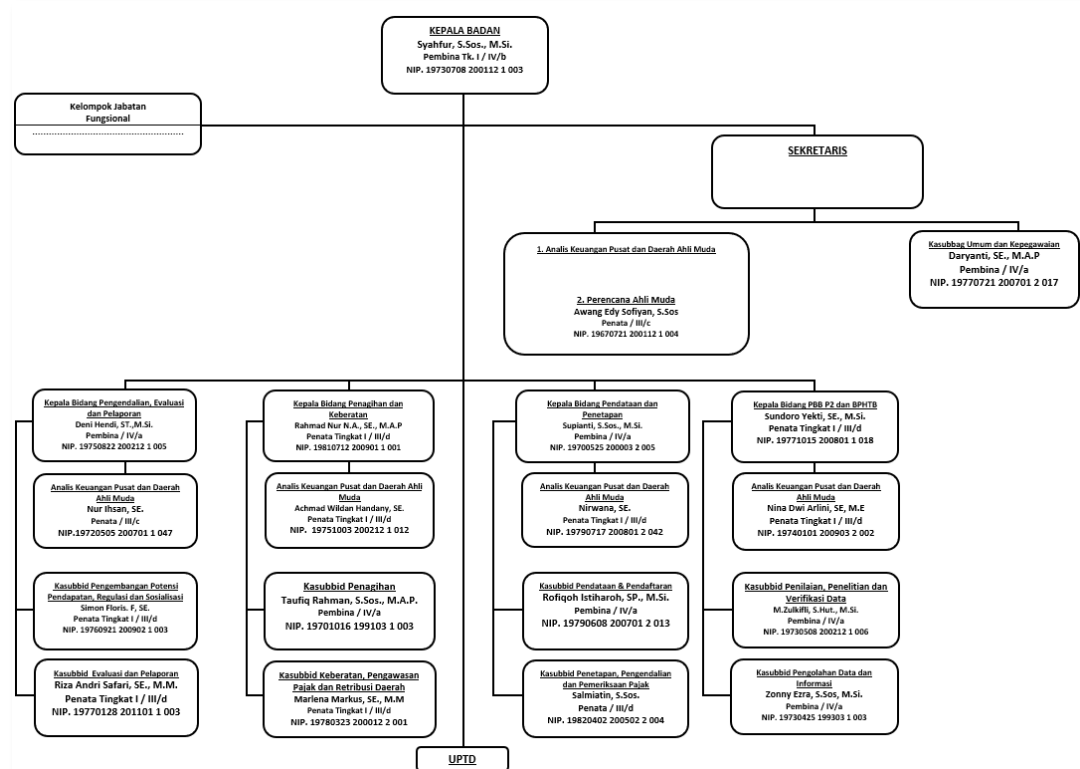
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi; dan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penagihan; dan
 - 2) Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- e. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - 2) Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak;
- f. Bidang PBB P2 dan BPHTB, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data; dan
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur

Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1 Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Gender

NO	URAIAN	GENDER		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	38	38	76
2	PPPK	51	51	102



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	GENDER		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
3	Outsourcing	3	8	11
	JUMLAH			189

Tabel 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Agama

NO	URAIAN	GENDER		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Islam	88	91	179
2	K. Protestan	2	4	6
3	K. Katholik	2	2	4
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
	JUMLAH			189

Tabel 4.3 Data Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat PIM

NO	URAIAN	GENDER		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Diklat PIM I	0	0	0
2	Diklat PIM II	0	0	0
3	Diklat PIM III	2	0	2
4	Diklat PIM IV	4	3	7
	JUMLAH			9

Tabel 4.4 Data ASN Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOL RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama	(IV/e)	0
2	Pembina Utama Madya	(IV/d)	0
3	Pembina Utama Muda	(IV/c)	0
4	Pembina Tk. I	(IV/b)	1
5	Pembina	(IV/a)	10
6	Penata Tk. I	(III/d)	23
7	Penata	(III/c)	13
8	Penata Muda Tk. I	(III/b)	11
9	Penata Muda	(III/a)	12
10	Pengatur Tk. I	(II/d)	3
11	Pengatur	(II/c)	2
12	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	0
13	Pengatur Muda	(II/a)	1
14	Juru Tk. I	(I/d)	0
15	Juru	(I/c)	0



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PANGKAT	GOL RUANG	JUMLAH
16	Juru Muda Tk. I	(I/b)	0
17	Juru Muda	(I/a)	0
18	PPPK	IX	62
19	PPPK	VII	10
20	PPPK	V	29
21	PPPK	I	1
	JUMLAH		178

Tabel 4.5 Daftar Nama Pejabat Struktural & Fungsional

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Syahfur, S.Sos, M.Si	19730708 200112 1 003	Pembina Tingkat I	Kepala Badan
2				Plt. Sekretaris
3	Supianti, S.Sos., M.Si	19700525 200003 2 005	Pembina	Kabid. Pendataan & Penetapan
4	Deni Hendi, ST.,M.Si.	19750822 200212 1 005	Pembina	Kabid Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan
5	Sundoro Yekti, S.E., M.Si	19771015 200801 1 018	Pembina	Kabid PBB P2 dan BPHTB
6	H. Rahmad Nur . N.A., S.E., M.A.P	19810712 200901 1 001	Penata Tingkat I	Kabid Penagihan & Keberatan
7	Taufiq Rahman, S.Sos., M.A.P	19701016 199103 1 003	Pembina	Kasubbid Penagihan
8	Zonny Ezra, SE, M.Si	19730425 199303 1 003	Pembina	Kasubbid Pengolahan Data & Informasi
9	M.Zulkifli, S.Hut, M.Si	19730508 200212 1 006	Pembina	Kasubbid Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data
10	Daryanti, SE., M.A.P	19770721 200701 2 017	Pembina	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Rofiqoh Istiharoh, S.P., M.Si	19790608 200701 2 013	Pembina	Kasubbid Pendataan & Pendaftaran
12	Marlena Markus, SE	19780323 200012 2 001	Penata Tingkat I	Kasubbid Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
13	Salmiatin, S.Sos	19820402 200502 2 004	Penata Tingkat I	Kasubbid Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak
14	Simon Floris F, S.E	19760921 200902 1 003	Penata Tingkat I	Kasubbid Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi, dan Sosialisasi
15	Riza Andri Safari, SE., MM	19770128 201101 1 003	Penata Tingkat I	Kasubbid Evaluasi & Pelaporan



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
16	Nina Dwi Arlini, SE, M.E	19740101 200903 2 002	Penata Tingkat I	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
17	Nirwana, SE.	19790717 200801 2 042	Penata Tingkat I	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
18	Achmad Wildan Handany, SE.	19751003 200212 1 012	Penata Tingkat I	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
19	Nur Ihsan, SE.	19720505 200701 1 047	Penata Tingkat I	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Tabel 4.6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3	S2	S1	D IV	D III	SLTA	SLTP	SD	
1	PNS	1	19	44	0	3	9	0	0	76
2	PPPK	0	0	62	0	10	29	0	1	102
3	OUTSOURCING	0	0	3	0	7	8	0	0	11
JUMLAH										189

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- 3) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, operasional, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
- 5) Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis badan; dan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- 1) Menetapkan program kegiatan dan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta menyesuaikan kebijakan pusat dan provinsi;
- 2) Merencanakan dan merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- 3) Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- 4) Mengkoordinasikan, memberi saran dan masukan kepada kepala daerah tentang langkah yang perlu di ambil dalam Bidang Pendapatan Daerah;
- 5) Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun;
- 6) Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional di Bidang Pendapatan Daerah, yang meliputi urusan sekretariat, bidang pendataan dan penetapan, PBB P2 dan BPHTB, penagihan dan keberatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan dan menyiapkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil atau dana perimbangan dan dana penerimaan lainnya; dan
- 8) Merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategik secara berkala;
- 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang pendapatan daerah;
- 10) Membina unit pelaksana teknis BAPENDA;
- 11) Menetapkan perizinan dan atau rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
- 12) Membina kelompok jabatan fungsional;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait dengan bidang tugasnya;
- 14) Melakukan pembinaan, pembagian tugas, motivasi, arahan dan penilaian kerja bawahan; dan



- 15) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
- 4) Pengelolaan urusan ASN.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja BAPENDA;
- 3) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
- 4) Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan program, dan keuangan BAPENDA;
- 5) Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan BAPENDA;
- 6) Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, arsip dan perlengkapan/ perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan BAPENDA;
- 7) Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data / informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja BAPENDA;
- 8) Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/ Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keberhasilan program kerja;



- 9) Mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang;
- 10) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPENDA;
- 11) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kerja BAPENDA;
- 12) Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan BAPENDA;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- 14) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- 15) Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- 16) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan tugas :

- 1) Menyusun dan perencanaan program kegiatan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- 5) Perumusan bahan pembinaan bimbingan regulasi dan sosialisasi



Dalam melaksanakan tugas di atas, bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, regulasi dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyusun rencana anggaran pendapatan Daerah, pembinaan teknis serta sosialisasi penerimaan Daerah;
- 3) Menyusun rancangan kebijakan peningkatan pendapatan dan monitoring serta evaluasi realisasi penerimaan;
- 4) Menganalisis dan menghimpun jenis sumber pendapatan Daerah;
- 5) Merumuskan bahan pengendalian operasional pungutan pajak dan retribusi;
- 6) Menyusun rencana pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan bagi hasil Provinsi dan Dana Penerimaan lain yang sah;
- 7) Menyusun rancangan kebijakan bidang pajak dan retribusi Daerah serta program kegiatan pengembangan potensi dan objek pendapatan Daerah;
- 8) Mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 9) Menyusun pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pembayaran;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- 11) Melakukan pembagian tugas pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penagihan dan Keberatan sebagai berikut :



- 1) Menyusun dan perencanaan program kegiatan penagihan, keberatan dan banding serta pengawasan dan pengendalian;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, Pengawasan dan Pengendalian dan Retribusi Daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- 3) Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi, restitusi dan kompensasi; dan
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang penagihan, keberatan dan banding serta pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengelolaan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
- 3) Merumuskan bahan penagihan, keberatan dan banding serta pengawasan dan pengendalian terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- 4) Mengkoordinasikan tugas kepala sub bidang yang berada di bawahnya;
- 5) Memonitoring pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan batas kewenangannya;
- 6) Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- 7) Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahannya; dan
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



e. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada kepala badan. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendataan dan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan perencanaan program kegiatan di bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
- 2) Merumuskan kebijakan dalam bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pajak dan retribusi Daerah; dan
- 4) Perumusan bahan pembinaan bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis verifikasi dan pemeriksaan dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas di atas, bidang pendataan dan penetapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja program dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengelolaan dari sektor pajak dan retribusi Daerah;
- 3) Merumuskan bahan pendataan dan penetapan Wajib Pajak, objek dan subjek pajak, melaksanakan perhitungan dan penetapan serta menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat ketetapan pajak Daerah dan dokumen lainnya;
- 4) Memantau pengelolaan surat berharga dan mengelola loket pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
- 5) Mengkoordinasikan tugas kepala seksi yang berada di bawahnya;
- 6) Memantau pendataan dan penetapan wajib pajak dan retribusi daerah, penilaian objek dan subjek pajak, pemeriksaan lokasi/ lapangan dan penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan retribusi Daerah;
- 7) Menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang, penyampaian surat ketetapan pajak dan penyimpanan arsip surat yang berkaitan dengan ketetapan pajak;



- 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- 9) Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahannya; dan
- 10) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang PBB P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan. Bidang PBB P2 dan BPHTB melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PBB P2 dan BPHTB yang meliputi :

- 1) Menyusun dan perencanaan di Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dan instansi lainnya; dan
- 3) Merumuskan kebijakan dalam bidang pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penilaian, pengolahan data dan informasi dan verifikasi data.

Dalam melaksanakan tugas di atas, bidang PBB P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penilaian, pengolahan dan verifikasi data PBB P2 dan BPHTB;
- 2) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, penilaian, pengolahan data dan perhitungan PBB P2 dan BPHTB;
- 3) Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui surat pemberitahuan pajak terhutang serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat badan dari instansi lainnya;
- 4) Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- 5) Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;



- 6) Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB
- 7) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan, pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- 8) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB sebagai bahan pengendalian operasional;
- 9) Pengendalian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/ pembayaran/ penyetoran PBB P2 dan BPHTB;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- 11) Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kerja bawahan; dan
- 12) Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari laporan keuangan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 surplus sebesar Rp 303.013.944.107,97 Realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 202.071.843.928,94 atau 142.43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp141.874.334.512,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp 81.965.925.694,14 atau 68.24 % jika dibanding dengan pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp120.105.918.234,80. Realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp54.948.626.745,00 atau 87.10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp63.088.221.770,00.

5.2 Saran

Adapun saran atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah yaitu beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan semua regulasi yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pajak, dan penerimaan daerah.
2. Mengimplementasikan prosedur pemantauan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pengecekan terhadap transaksi, pencatatan, dan pelaporan.
3. Mendokumentasikan semua proses dan prosedur yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk bukti-bukti yang mendukung.
4. Mengimplementasikan prosedur pencatatan yang memadai untuk semua transaksi keuangan, termasuk bukti-bukti pendukung.
5. Memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan kualitas laporannya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN